

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN
STUNTING TERINTEGRASI**
(STUDI KASUS KECAMATAN PINANGSORI)

SKRIPSI

OLEH:

MELYSA FEBI MARIA TOBING

218520001



**PRORAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/1/26

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN
STUNTING TERINTEGRASI**
(STUDI KASUS KECAMATAN PINANGSORI)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

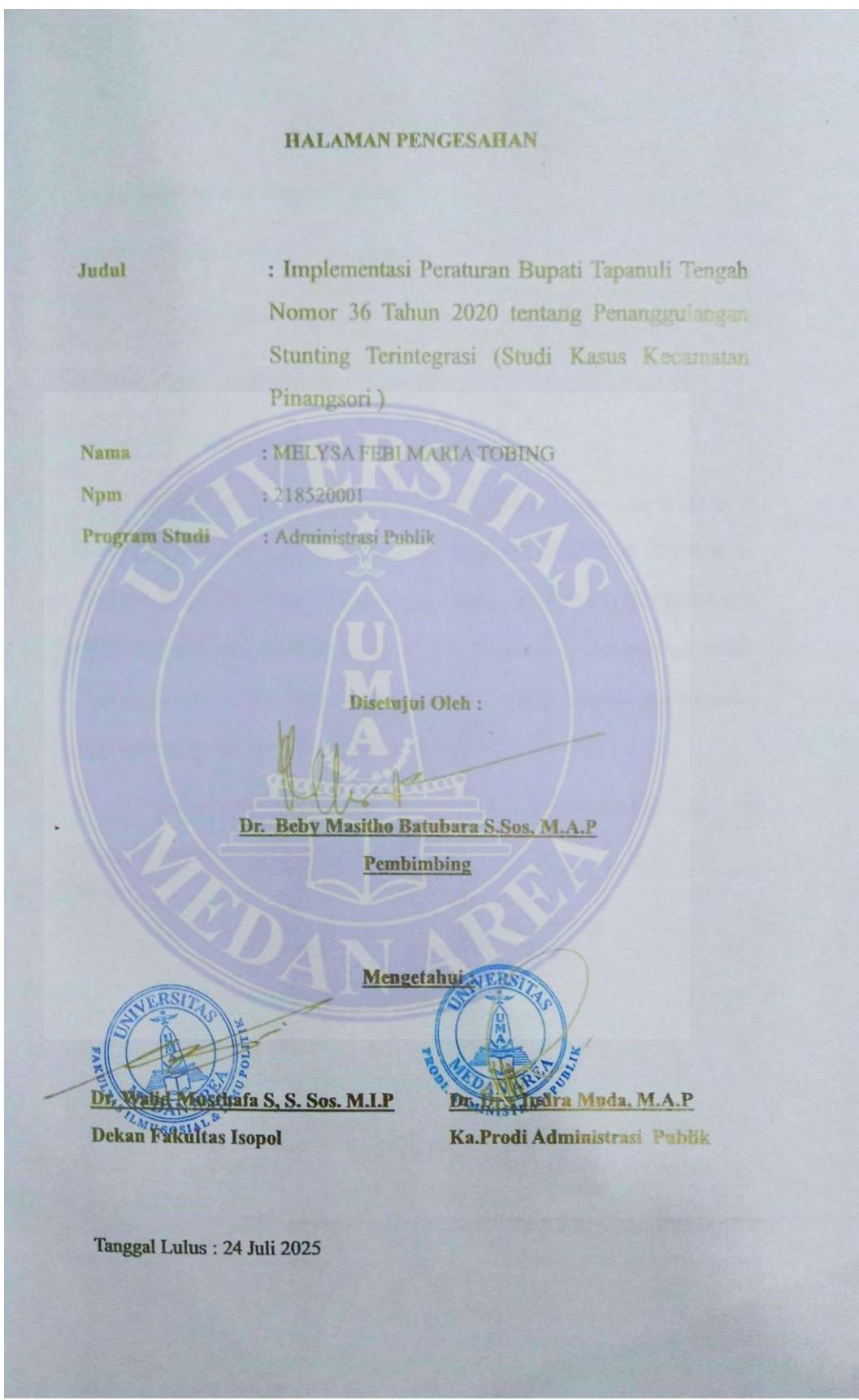
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melysa Febi Maria Tobing

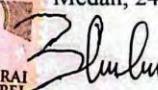
NPM : 218520001

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING (STUDI KASUS KECAMATAN PINANGSORI)**" adalah benar-benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini maka sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 24 Juli 2025

Melysa Febi Maria Tobing



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melysa Febi Maria Tobing

Npm : 218520001

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-an, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencaantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pertanyaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Juli 2025

Melysa Febi Maria Tobing

Npm 218520001



ABSTRAK

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak langkah-langkah baik yang bisa dilakukan pemerintah namun tidak ada dampaknya terhadap kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori) sudah berjalan dengan baik, jika dilihat dari beberapa indikator seperti komunikasi telah dilakukan dengan beberapa upaya yang signifikan dalam mensosialisasikan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi, sumber daya telah melakukan persiapan sumber daya yang baik, disposisi terlihat jelas komitmen serta antusias dari pihak yang terkait dan struktur birokrasi telah diatur dengan baik serta mudah dipahami. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya yang signifikan, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai stunting serta masalah ekonomi yang mengharuskan masyarakat untuk lebih mengutamakan mencari nafkah daripada mengikuti program penanggulangan stunting merupakan faktor penghambatnya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Penanggulangan, Stunting

ABSTRACT

Implementation is a very important step in the policy process. There are many good steps that the government can take but have no impact on the life of the country. This study aims to analyze the Implementation of the Central Tapanuli Regent Regulation No. 36 of 2020 concerning Integrated Stunting Management (Case Study of Pinangsori District). This study uses the theory of policy implementation according to Edward III with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative approach using data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Central Tapanuli Regent Regulation Number 36 of 2020 concerning Integrated Stunting Mitigation (Case Study of Pinangsori District) has been going well, when viewed from several indicators such as communication has been carried out with several significant efforts in socializing the Central Tapanuli Regent Regulation Number 36 of 2020 concerning Integrated Stunting Mitigation, resources have made good resource preparation, the disposition is clearly visible, the commitment and enthusiasm of the related parties and the bureaucratic structure has been well regulated and easy to understand. Although several significant efforts have been made, the lack of public awareness regarding stunting and economic problems that require people to prioritize earning a living rather than participating in stunting mitigation programs are inhibiting factors.

Keywords: *Implementation, Policy, Mitigation, Stunting*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Melysa Febi Maria Tobing
2. Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori
3. Tempat/Tanggal Lahir : Perancis, 09 Februari 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Kristen Protestan
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon/HP : 085270766054
9. E-mail : melysafebimariatobing@gmail.com
10. Kode Pos : 22654

PENDIDIKAN FORMAL

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| 2010-2015 | : SD Negeri 153076 Pinangsori |
| 2015-2018 | : SMP Negeri 1 Pinangsori |
| 2018-2021 | : SMA Negeri 1 Pinangsori |
| 2021- Sekarang | : Universitas Medan Area |
| Jurusan | : Administrasi Publik |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terimakasih yang tulus dan penuh cinta kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Julhalbert Lumbantobing dan Emraulina Sinaga yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas segala cinta dan didikan yang tidak ternilai, yang menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan Panjang ini.
2. Saudara saudara saya yang tersayang Olivia Tobing, Yunita Tobing, Maikel Tobing, Christine Tobing, Magdalena Tobing, Ronald Tobing, dan Gabriel Tobing. Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang selalu menguatkan saya hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ini dengan baik.
3. Kepada Oppung dan seluruh keluarga Tobing, Sinaga, terimakasih atas segala kasih cinta, nasehat, dukungan tanpa henti, dan sudah menjadi teman cerita baik suka maupun duka, sehingga saya mampu menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegritas (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori)**.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, kepada Bapak Dr. Drs., Indra Muda, M.AP, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dan selaku pembanting yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini. Ibu Dr. Beby Masitho Batubara selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis memberikan motivasi disetiap tahap penyusunan skripsi ini. Dr. Chairika Nst, S.AP, M.AP selaku Ketua panitia yang telah memberi bimbingan dalam penyelesaian Skripsi ini. Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP selaku Sekretaris panitia yang telah memberi bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Staf Pengajar, Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan proses administrasi perkuliahan.

Medan, 24 Juli 2025



Melysa Febi Maria Tobing

218520001

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix

1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2. Manfaat Praktis.....	12
II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kebijakan.....	13
2.1.1. Defenisi Kebijakan	13
2.1.2. Kebijakan Publik.....	12
2.1.3. Jenis-jenis Kebijakan Publik	13
2.2. Implementasi	14
2.2.1. Defenisi Implementasi Kebijakan Publik.....	14
2.2.2. Tahap Tahap Implementasi Kebijakan	17
2.2.3. Model Implementasi Kebijakan	17
2.3. Stunting	21
2.3.1. Defenisi Stunting.....	21
2.3.2. Penyebab Stunting.....	24
2.3.3. Penanggulangan Stunting	26
2.4. Penelitian Terdahulu	27

2.5. Kerangka Pemikiran	33
III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Lokasi dan waktu penelitian.....	39
3.2.1. Lokasi Penelitian	39
3.2.2. Waktu Penelitian.....	39
3.3. Informan Penelitian	40
3.4.Teknik Pengumpulan Data	42
3.5.Teknik Analisis Data.....	46
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.1.1. Gambaran Kabupaten Tapanuli Tengah.....	49
4.1.2. Gambaran Kecamatan Pinangsori.....	52
4.1.3. Visi Dan Misi Kecamatan Pinangsori.....	54
4.2. Hasil Penelitian.....	56
4.3. Pembahasan Penelitian.....	71
V KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan.....	77
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

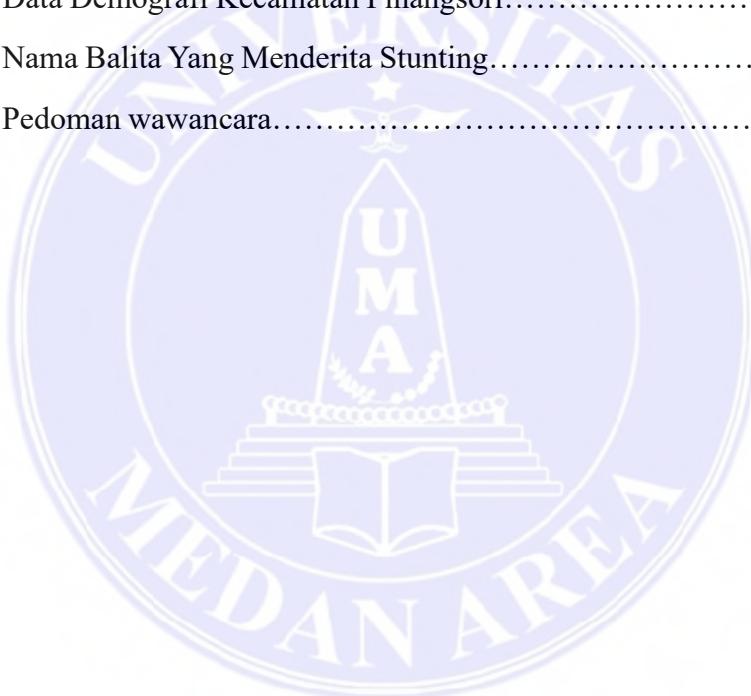
Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Berpikir.....	37
Gambar 2. Teknik Analisa Data	48
Gambar 3. Struktur Kepengurusan Kecamatan Pinangsori.....	56
Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Bahwa Dapat Melangsungkan Pernikahan....	61
Gambar 5. Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Penanggulangan Stunting...	62
Gambar 6. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Kepada Masyarakat.....	66
Gambar 7. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.....	68
Gambar 8. Pengecekan Balita.....	69



Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Stunting 3 tahun terakhir Di Kecamatan Pinangsori.....	7
Tabel 2. Jumlah Balita Stunting Tahun 2024.....	7
Tabel 3. Peneliti Terdahulu.....	28
Tabel 4. Waktu Penelitian.....	40
Tabel 5. Informan Penelitian.....	42
Tabel 6. Data Demografi Kecamatan Pinangsori.....	53
Tabel 7. Nama Balita Yang Menderita Stunting.....	57
Tabel 8. Pedoman wawancara.....	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi saat ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk yang menimbulkan berbagai permasalahan bagi masyarakat. Salah satu permasalahan yang sangat krusial di negara miskin dan berkembang adalah stunting, yang dikenal sebagai kondisi balita pendek akibat kekurangan gizi. Keterlambatan pertumbuhan yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan linier pada balita disebut *stunted development*. Permasalahan ini muncul akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, sejak masa kehamilan hingga usia 24 bulan, yang menghambat perkembangan fisik dan mental serta meningkatkan risiko kematian. Di kemudian hari, balita yang mengalami stunting berisiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan produktivitas.

Perbaikan gizi yang segera diperlukan karena masalah gizi merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan erat dengan siklus kehidupan individu. Masalah gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, mulai dari bayi yang masih dalam kandungan, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan lansia. Setiap tahap kehidupan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda, dan masalah gizi yang dialami pada usia tertentu dapat berdampak signifikan terhadap status gizinya pada tahap siklus kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, intervensi yang tepat dan tepat waktu sangat penting untuk menurunkan angka obesitas dan mencegah terjadinya kekurangan gizi, terutama pada anak kecil yang merupakan masalah serius di Indonesia. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah gizi tersebut dapat

terus berlanjut dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang, antara lain meningkatnya risiko penyakit kronis, menurunnya kualitas hidup, serta berdampak negatif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Stunting masalah kekurangan gizi yang menimpas balita di seluruh dunia, menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, tubuh yang tidak sebanding dengan teman seusianya, dan tubuh yang jauh lebih pendek. Dalam menangani masalah *stunting* organisasi kesehatan dunia (WHO) merekomendasikan prevalensi *stunting* dibawah 20% di seluruh dunia. Untuk menurunkan angka *stunting* setiap tahunnya prevalensi *stunting* menjadi prioritas utama pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 menetapkan penurunan tingkat *stunting* dan kematian ibu sebagai strategi prioritas. Dengan penurunan kecepatan ini target prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 14%.

Stunting merupakan masalah berkelanjutan yang belum ditangani secara efektif oleh Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah Pusat dan Daerah telah melakukan upaya bersama untuk mencegah *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi yang tidak sehat dalam kandungan, pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan perubahan yang cepat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, termasuk anak balitanya. Pada tahun 2023, ada 30,2 juta anak di Indonesia dengan tingkat *stunting* sekitar 21,5%, atau 6.342.000 anak (Kemenkes RI, 2023).

Undang-Undang di Indonesia telah dibuat untuk menetapkan kebijakan untuk mencegah *stunting*, secara khusus UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 141, 142 dan 143 menekankan pentingnya peningkatan gizi. Tujuan dari perbaikan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi makanan seimbang, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, mendorong kegiatan fisik dan kesehatan, memperkuat sistem pengawasan pangan dan gizi, meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan gizi, dan mendorong kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan ketersediaan gizi yang cukup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting menetapkan bahwa stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan penyakit infeksi berulang, yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan yang tidak sesuai. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Menteri. Strategi nasional percepatan penanggulangan stunting menetapkan beberapa kelompok sebagai prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai dengan 24 bulan atau yang dikenal dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, upaya pencegahan stunting juga harus diarahkan kepada remaja putri, Wanita Usia Subur (WUS), dan anak usia 24 bulan sampai dengan 59 bulan.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanggulangan stunting untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan stunting di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Kebijakan ini meliputi strategi nasional yang berfokus pada intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita dan edukasi

tentang pemberian ASI eksklusif, serta intervensi sensitif, seperti peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Agar intervensi tersebut dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting pada tahun 2025, diperlukan kerja sama yang erat antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

Menurut data Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilansir MetroDaily (2024), angka stunting mengalami penurunan sebesar 6,7% pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun tersebut, angka stunting masih tergolong tinggi, yakni sebesar 30,5%. Pada tahun 2023, angka stunting kembali menurun sebesar 6,7%, menjadi 23,8%. Salah satu faktor penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat dan pola makan yang baik untuk mencegah terjadinya stunting. Penjabat Bupati Tapteng dalam Kantong Berita (2023) mengungkapkan bahwa kebiasaan buruk, seperti kebiasaan merokok pada keluarga yang memiliki anak, turut menyebabkan kondisi tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran gizi dalam tumbuh kembang anak, tingginya angka stunting menunjukkan perlu adanya edukasi yang lebih komprehensif dan intensif.

Menurut penelitian Dhea Jayanti Pratiwi (2021) bahwa kasus stunting ini cenderung lebih sering ditemukan di daerah-daerah terpencil dan tingkat kemiskinannya tinggi, karena orang tua tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Tapteng dalam SinarlintasNews.com (2023) dari 33 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara, secara komulatif Tapanuli Tengah merupakan salah satu penyumbang *stunting* 31%, menandakan masalah kesehatan masyarakat yang serius jika prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Dengan kata lain, *stunting* di Tapteng dianggap kronis secara

nasional. Namun, angka stunting masih jauh dari target pemerintah sebesar 14% pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan berbagai langkah seperti melakukan pelatihan bagi pihak yang terlibat dalam penanggulangan *stunting*, termasuk kader posyandu, penyuluh keluarga berencana (PKB), kepala puskesmas, dan penyuluh program lainnya.

Tingginya angka stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan bahwa koordinasi antar sektor belum berjalan optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terpadu. Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk melakukan berbagai kegiatan intervensi yang ditujukan untuk menurunkan angka stunting. Melalui peraturan ini, diharapkan dapat tercipta dukungan yang lebih kuat dan upaya yang lebih tepat sasaran dalam menangani permasalahan stunting di setiap daerah di Tapanuli Tengah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama secara lebih efektif dan efisien, sehingga upaya penanggulangan stunting dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak di daerah tersebut.

Kabupaten Tapanuli Tengah masih masuk pada dominasi daerah yang terbelakang dan memiliki sumber daya yang rendah salah satunya Kecamatan Pinangsori. Pinangsori merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang masih memiliki kasus *stunting* yang dimana pekerjaan utama sebagian besar masyarakat adalah di sektor pertanian dan perkebunan, dan usaha *home industry* (pembuatan tahu, tempe, toge, dan tape) yang kerap kali menuntut

orang tua untuk meninggalkan anak-anak mereka dirumah. Ketidakterlibatan orang tua dalam jangka waktu yang panjang berdampak pada asupan nutrisi dan pengawasan yang dibutuhkan anak-anak dalam usia pertumbuhannya, khususnya untuk pemberian ASI yang ekslusif.

Masyarakat di wilayah Pinangsori cenderung memandang stunting bukan sebagai masalah kesehatan serius, melainkan sebagai faktor keturunan atau genetik. Minimnya pemahaman tersebut disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai stunting sebagai masalah gizi kronis yang sebenarnya dapat dicegah dan diobati. Akibatnya, masyarakat kurang termotivasi untuk menerapkan pola asuh dan pola makan yang dapat membantu mencegah stunting. Penanganan stunting di Kecamatan Pinangsori dilakukan melalui dua jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Sasaran intervensi gizi spesifik adalah ibu hamil dan anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang meliputi pemberian makanan tambahan bagi balita dan anak balita, pelaksanaan pemantauan status gizi melalui anggaran, serta sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan *stunting*. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi dan edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI). Sementara itu, sasaran intervensi gizi sensitif adalah masyarakat umum, dengan fokus pada peningkatan penyediaan air minum aman dan sanitasi yang memadai. Data kasus *stunting* di Kabupaten Pinangsori menunjukkan pada tahun 2022 terdapat 5 kasus, tahun 2023 tidak ada kasus, dan tahun 2024 terdapat 6 kasus.

Tabel 1. Jumlah stunting 3 Tahun Terakhir di Kecamatan Pinangsori

Tahun	Jumlah stunting
2022	5
2023	-
2024	6

Sumber : Data Puskesmas Pinangsori

Melihat data rekapan yang diobservasi dari data puskesmas Pinangsori terjadi penurunan dan peningkatan angka *stunting* dari tahun sebelumnya hingga tahun saat ini dan hal ini memberi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk melakukan tindakan *intervensi* dalam menanggulangi angka *stunting*. *Intervensi* ini harus dilakukan dengan aksi nyata dan perealisasian program pemerintah dalam menekan angka *stunting* dengan menggunakan bantuan dana pemerintah. Pada tahun 2024 terdapat 6 anak *stunting* di Kecamatan Pinangsori, yaitu :

Tabel 2. Jumlah Balita Stunting tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah
1.	Pinangsori	1
2.	Pinangbaru	3
3.	Alpran	2
4.	Danau Pandan	-
5.	Gunung Marijo	-
6.	Parjalihotan Baru	-
7.	Sihaporas	-
8.	Toga Basir	-
9.	Sitonong Bangun	-
10.	Sori Nauli	-
	Total	6

Sumber : Data Puskesmas Pinangsori

Merujuk pada data yang disediakan pada tabel 2, bahwa Kecamatan Pinangsori terdiri dari 5 desa dan 5 kelurahan, diantara 5 desa dan 5 kelurahan

memiliki beberapa anak *stunting*. Di Kecamatan Pinangsori banyak kasus anak *stunting* yang disebabkan oleh pola asuh yang buruk, kurangnya gizi untuk bayi dan ibu pada saat sebelum dan sesudah melahirkan, dan lingkungan yang buruk. Kedua faktor ini dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat akan mengikuti sosialisasi atau penyuluhan yang disediakan pemerintah. Inilah mengapa pemerintah harus berpartisipasi secara aktif dalam menanggulangi *stunting* dengan membangun program untuk mengatasi penyebab *stunting*.

Untuk menangani permasalahan stunting secara lebih serius dan terkoordinasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangan stunting yang dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan lintas sektor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk

1. Penanggulangan stunting terintegrasi adalah strategi dan kebijakan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, konvergen dan bersama sama dalam penanggulangan stunting kepada sasaran prioritas penyelenggaran intervensi dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat.
2. Penanggulangan stunting terintegrasi ini bertujuan :

- a. Memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan Masyarakat di semua tingkatan
- b. Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting
- c. Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah dan desa
- d. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan dan
- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar memberikan layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa ruang lingkup intervensi penanggulangan stunting mencakup dua bentuk, yakni intervensi gizi spesifik, yang menyangkut langsung kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta intervensi gizi sensitif, yang melibatkan penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dasar, edukasi, serta dukungan sosial ekonomi lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh WHO dan pemerintah pusat, yakni penanganan stunting secara multisektor.

Dalam implementasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi juga melibatkan perangkat daerah lainnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Strategi pelaksanaan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6, dilakukan melalui pendekatan edukatif dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

partisipatif, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan keluarga, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkala atas status gizi dan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, keberlanjutan program ini juga dijamin melalui aspek pendanaan yang diatur dalam Pasal 8, yakni melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, dan sumber pembiayaan sah lainnya. Melalui peraturan ini, terlihat adanya komitmen daerah dalam menciptakan kebijakan yang komprehensif, integratif, dan berbasis bukti dalam upaya menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, skripsi ini memfokuskan pada analisis implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Pinangsori, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini telah dilaksanakan dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dijalankan di Kecamatan Pinangsori, sebagai salah satu daerah yang masih memiliki kasus stunting. Penulis memiliki kepentingan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kasus *stunting* di Kecamatan Pinangsori. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di daerah Pinangsori, dengan mengurangi pravelensi *stunting* di Kecamatan Pinangsori. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No. 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori) ”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah “ Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 36 tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori) ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan yaitu untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi (Studi Kasus Kecamatan Pinangsori).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan konsep ilmu administrasi publik, khususnya yang terkait dengan kajian kebijakan kesehatan. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Penanganan Stunting Terpadu, dengan mengambil Kecamatan Pinangsori sebagai studi kasus. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat daerah, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dan praktisi di bidang kesehatan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk

mengatasi masalah stunting. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya intervensi gizi dan kesehatan, serta mendorong kolaborasi antarsektor dalam upaya penanganan stunting secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman yang dimiliki, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah stunting dan kebijakan penanggulangannya, sehingga penulis dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di bidang administrasi publik dan kesehatan di masa mendatang.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan stunting di lingkungan sekitar, sehingga dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan pola hidup sehat dan mendukung tumbuh kembang anak di lingkungannya.
3. Bagi Institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menyajikan masalah gizi stunting, serta menjadi panduan bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan dan upaya penanggulangan masalah gizi stunting, sehingga dapat memperkaya literatur yang ada dan mendorong penelitian yang lebih komprehensif di bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Defenisi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi kebijakan adalah Kumpulan konsep dan prinsip yang membentuk fondasi dan kerangka rencana kerja untuk kepemimpinan, pekerjaan, dan perilaku (yang berkaitan dengan pemerintah dan organisasi) ini berfungsi sebagai deklarasi tujuan, prinsip, cita-cita, atau niat yang membantu manajemen untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa defenisi yang diberikan oleh Roberts Eyeston dalam Pramono (2020:29) menggambarkan kebijakan publik sebagai hubungan antara suatu unit pemerintahan dan lingkungannya, seseorang dapat menggambarkan proses kebijakan sebagai tuntutan untuk melakukan perubahan dalam proses membuat, menentukan, melaksanakan dan mengedalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain, proses mencakup keseluruhan tuntutan peristiwa dan perbuatan yang terus berubah.

Kebijakan adalah jenis tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara, yang berasak dari kewenangan diskresi yang biasanya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang. Menurut Hadjon dalam Pramono (2020:29), “ Peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan ”. Kebijakan adalah ide dan prinsip yang berfungsi sebagai belas tugas, tindakan dan kepemimpinan.

Selain individu, istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok di sektor swasta. Dalam hal meningkatkan pelayanan publik, pemerintah juga bisa disebut kebijaksanaan.

2.1.2 Kebijakan Publik

Salah satu aspek penting dari bidang administrasi publik adalah kebijakan publik, karena ini memungkinkan birokrasi, swasta dan masyarakat untuk melakukan semua aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, fungsinya dianalogikan dengan otak manusia. Kebijakan publik adalah alat nyata yang menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan publik ini merupakan titik awal untuk semua proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, pembangunan, dan pelayanan publik. Kebijakan publik berfungsi sebagai titik awal untuk program dan kegiatan pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu, Pareto mengatakan bahwa kebijakan publik sangat penting untuk kemajuan dan gambaran suatu negara.

Menurut Keban dalam Muda & Aulia (2022:17) kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu produk, proses, dan kerangka kerja melalui konsep-konsep filosofis. Sebagai suatu bentuk konsep filosofis, kebijakan publik merupakan sekumpulan asas atau kondisi yang diinginkan, sedangkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian simpulan atau rekomendasi, sedangkan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai sarana yang dengannya organisasi dapat menemukan apa yang diharapkan, khususnya program dan mekanisme realisasi produk, kemudian sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan

merupakan suatu proses negosiasi, di mana negosiasi digunakan untuk menjabarkan isu-isu dan cara mengimplementasikannya.

2.1.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan, Pemerintah pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan Pemerintah,
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara. Namun demikian menurut Nugroho (2006:31), kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan yang atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas
2. kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.
3. kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh apparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2.2 Implementasi

2.2.1 Defenisi Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Meskipun pemerintah memiliki berbagai rencana yang baik, namun seringkali rencana tersebut tidak memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Huntington dalam Mulyadi (2016:24), perbedaan utama antar negara bukanlah pada bentuk pemerintahan atau ideologi yang dianut, melainkan pada sejauh mana negara tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Tingkat efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan birokrasi, kabinet, dan presiden dalam mengimplementasikan kebijakan dan keputusan. Dalam hal ini, administrator memiliki peran penting dalam merancang struktur organisasi yang tepat. Organisasi disini meliputi pengelolaan sumber daya, pembentukan unit kerja, dan metode yang digunakan untuk menjalankan program. Penafsiran yang tepat diperlukan agar rencana dan petunjuk pelaksanaan program dapat diterima dan diterapkan secara efektif. Secara umum, implementasi berarti penggunaan berbagai instrumen untuk menjalankan atau mewujudkan suatu program. Dengan kata lain, tahap di mana tujuan program mulai terlaksana. Oleh karena itu, pada tahap ini, penting untuk mempersiapkan proses implementasi dengan menganalisis berbagai kemungkinan keberhasilan dan hambatan yang mungkin terjadi.

Menurut Wibawa (2018:15), implementasi merupakan suatu kegiatan yang terjadi setelah arahan resmi suatu kebijakan ditetapkan, dan meliputi upaya pengelolaan berbagai masukan agar menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi

masyarakat. Terdapat perbedaan yang jelas antara proses perumusan kebijakan dengan tahap implementasi. Implementasi kebijakan mengikuti pendekatan *top-down*, di mana keputusan kebijakan umum atau makro diterjemahkan ke dalam tindakan yang lebih spesifik dan operasional. Sebaliknya, perumusan kebijakan menggunakan pendekatan *bottom-up*, karena berawal dari penyampaian aspirasi, tuntutan, atau dukungan dari masyarakat.

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2016:24), implementasi mencakup serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini, peran administrator sangat penting dalam mengatur bagaimana kebijakan yang dipilih diorganisasikan, ditafsirkan, dan ditetapkan. Proses pengorganisasian mencakup pengelolaan sumber daya, unit kerja, dan metode yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Interpretasi mengacu pada proses pengintegrasian ketentuan program ke dalam rencana dan instruksi yang ada. Sementara itu, implementasi sendiri melibatkan pelaksanaan pembayaran dan penyediaan layanan secara rutin. Dengan kata lain, implementasi adalah fase di mana tujuan program mulai terwujud. Pada tahap ini, aspek yang paling penting adalah persiapan, yang mencakup analisis mendalam tentang kemungkinan hasil yang akan dicapai serta potensi kegagalan, termasuk hambatan, peluang, dan sejauh mana kapasitas organisasi untuk melaksanakan program.

Menurut Abidin dalam Mulyadi (2016:24) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini menekankan pentingnya fungsi organisasi atau lembaga. Apabila organisasi dinilai belum sejalan dengan perubahan kebijakan, maka diperlukan perencanaan perubahan. Perencanaan perubahan ini meliputi perencanaan implementasi kebijakan yang ditujukan untuk melakukan perubahan internal dalam organisasi, serta perencanaan perubahan yang diperlukan untuk menghadapi perubahan yang datang dari luar.

2. Pendekatan prosedural/manajerial

Pendekatan ini memandang implementasi sebagai serangkaian tindakan pelaksanaan, termasuk perencanaan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan teknik peninjauan. Dalam proses implementasi, dua elemen yang paling penting adalah urutan dan prioritas.

3. Pendekatan kewajiban/ *behavior*

Pendekatan ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan suatu kebijakan oleh masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan tersebut, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan pelaksanaannya.

4. Pendekatan politik

Pendekatan politik dalam implementasi kebijakan menekankan peran kekuatan, kepentingan, dan kekuasaan politik dalam proses tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan strategi politik para aktor yang terlibat.

2.2.2 Tahap Tahap Implementasi Kebijakan

Tahap-tahap implementasi kebijakan untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Pramono (2020:42) tahapan implementasi dibagi dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa kebijakan akan dilaksanakan sendiri, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
2. Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa tujuan pembuatan kebijakan publik harus dicapai oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin termasuk kebijakan yang bersifat *non-self executing* karena perlu dibuat dan dilaksanakan oleh berbagai pihak agar tujuan tercapai.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Tahir (2014:61-71) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang sangat penting karena tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan dan seberapa baik persiapan dan perencanaan implementasinya, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai. Sebaliknya tidak peduli seberapa baik persiapan dan perencanaan penerapan kebijakan publik tidak akan tercapai. Selanjutnya George C. Edward II menyatakan dalam subarsono (2005) bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut sering terakumulasi.

1. Komunikasi

Untuk menjalankan kebijakan dengan sukses, pelaksana harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Untuk mengurangi distorsi implemenasi, tujuan dan sasaran harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Resistensi kelompok sasaran dapat terjadi jika tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali. Komunikasi yang tidak sempurna akan mempengaruhi cara para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, misalnya menyemiotikan kebijakan menjadi kebijakan umum otoritas khusus ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya untuk mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan, mengetahui apa yang harus dilakukan adalah kunci untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif .

2. Sumber daya

Sumber daya yang penting meliputi karyawan yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara menerapkan kebijakan, dan penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk menerapkan kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di berbagai fasilitas atau melalui pelayanan yang diberikan. Sumber daya pelaksana dilaksanakan sebagai kemampuan pelaksana jika sumber daya organisasi dianggap sebagai kemampuan organisasi. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, penerapannya tidak akan berhasil jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya. Sumber daya manusia, yaitu pelaksana kemampuan, dan sumber daya keuangan dapat menjadi

komponen sumber daya tersebut. Untuk penerapan kebijakan yang efektif, sumber daya sangat penting, jika tidak ada sumber daya kebijakan hanya akan menjadi dokumen kertas.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena meskipun ketentuan kebijakan jelas dan konsisten, penerapan kebijakan tidak akan efektif jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Ada berbagai jenis sumber daya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia .

3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu pada kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap mereka yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah

diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak tertabat lebih membingungkan, karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang berperan dalam melaksanakan kebijakan memiliki dampak yang besar terhadap efektivitas penerapan kebijakan tersebut. Salah satu elemen penting dalam struktur organisasi adalah keberadaan prosedur operasional standar (*standard operating procedure atau SOP*), yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas mereka. SOP membantu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berjalan sesuai aturan dan konsisten. Namun, apabila struktur organisasi terlalu berjenjang atau memiliki banyak lapisan, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan memicu munculnya birokrasi—yaitu prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan kompleks yang pada akhirnya menghambat penghentian serta kelancaran kegiatan organisasi.

Menurut Edward III, keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling terkait dan bekerja sama. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam suatu proses yang kompleks, yang dapat mendukung atau menghambat implementasi kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan

yang paling tepat untuk memahami dinamika implementasi kebijakan adalah dengan melihat semua faktor tersebut secara terpadu dan holistik, bukan secara terpisah. Setiap faktor berperan penting dalam membentuk realitas implementasi kebijakan, sehingga dengan membahasnya secara bersama-sama akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang kondisi implementasi yang sebenarnya.

Namun, mengingat kompleksitas yang melekat dalam proses implementasi kebijakan, upaya untuk memahaminya sering kali memerlukan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih sistematis. Penyederhanaan ini tidak berarti mengabaikan kompleksitas, tetapi merupakan cara untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian atau komponen utama yang lebih mudah dianalisis. Dengan merinci dan mengkategorikan elemen penting dalam implementasi seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi kita dapat memahami peran setiap komponen dalam mendukung keberhasilan kebijakan dengan lebih jelas. Langkah ini sangat penting untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang perlu diperbaiki, sekaligus memperkuat elemen-elemen yang selama ini berjalan efektif. Dengan demikian, pemahaman tentang implementasi kebijakan menjadi lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi guna meningkatkan implementasi kebijakan publik secara lebih tepat.

2.3 Stunting

2.3.1 Definisi Stunting

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan anak yang berada di bawah -2,0 standar deviasi

(SD) dari median standar pertumbuhan anak berdasarkan grafik z-score yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2018). Pengukuran status gizi ini dilakukan dengan cara membandingkan tinggi badan atau panjang badan balita dengan standar pertumbuhan anak seusianya. *Stunting* mencerminkan masalah gizi yang terjadi dalam jangka waktu lama, sering kali dimulai sejak masa kehamilan akibat asupan gizi yang tidak memadai atau infeksi berulang yang tidak tertangani dengan baik.

Masalah *stunting* menjadi perhatian serius di bidang kesehatan masyarakat karena berdampak langsung pada perkembangan fisik, kognitif, dan produktivitas anak di kemudian hari. Anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki kecerdasan yang lebih rendah, prestasi akademik yang buruk, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi saat dewasa. Dalam skala yang lebih luas, *stunting* dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan memperlambat kemajuan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan *stunting* harus menjadi prioritas strategis dalam pengembangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak.

2.3.2 Penyebab Stunting

Sasaran kedua dari (SDGs) menekankan pentingnya mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan gizi yang masih melanda sebagian besar penduduk dunia. Data menunjukkan bahwa satu dari sembilan orang mengalami kekurangan gizi, dan kondisi ini berkontribusi terhadap hampir setengah dari seluruh kematian anak di bawah usia lima tahun. Selain itu, satu dari empat anak di dunia mengalami *stunting*, yaitu gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Sasaran

SDGs ini bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk *stunting* dan *wasting*, terutama pada anak di bawah lima tahun, serta mencakup pemenuhan kebutuhan gizi kelompok rentan seperti remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia, yang juga dikaitkan dengan tujuan kelima SDGs tentang kesetaraan gender dan kesehatan ibu.

Masalah *stunting* sendiri telah diakui sebagai isu global yang sangat krusial. Dalam daftar prioritas masalah gizi global yang dirilis oleh WHO (2014), *stunting* berada di urutan teratas. Meskipun *stunting*, *wasting*, dan *underweight* didefinisikan secara berbeda, ketiganya sering kali saling terkait dan saling memperkuat dampak negatifnya. Anak-anak yang mengalami lebih dari satu bentuk kekurangan gizi (beberapa pengukuran antropometri) memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit dan kematian. Oleh karena itu, pendekatan untuk mengukur pertumbuhan anak tidak boleh hanya berfokus pada satu indikator, tetapi lebih mempertimbangkan kombinasi seperti berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) yang dapat mencerminkan kekurangan gizi akut dan juga efektivitas intervensi gizi yang diberikan.

Penyebab terjadinya *stunting* sangat beragam dan kompleks, mulai dari faktor genetik hingga faktor lingkungan. Berdasarkan konsep UNICEF, penyebab terjadinya *stunting* antara lain adalah kurangnya kebutuhan dasar, seperti kondisi politik, status sosial ekonomi yang buruk, serta kurangnya asupan gizi dan infeksi. Sementara itu, beberapa faktor lain turut memengaruhi terjadinya *stunting*, seperti ibu yang pendek, jarak kelahiran yang sempit, kehamilan saat remaja, jenis kelamin laki-laki, pola pendidikan, pelayanan kesehatan, ibu dengan defisiensi zink dan zat besi, berat badan lahir rendah, panjang badan lahir pendek, riwayat malnutrisi di

awal kehidupan, lingkungan yang tidak higienis, praktik pemberian ASI yang buruk, anemia, kurangnya suplemen vitamin A, infeksi, ibu yang merokok, serta bayi prematur.

Kejadian *stunting* pada anak-anak dapat membawa masalah yang serius pada perkembangan sumber daya manusia, yang dampak jangka panjangnya, antara lain adalah berkurangnya perkembangan kognitif dan fisik, penurunan kapasitas kerja, kesehatan yang buruk, dan peningkatan resiko penyakit *degenerative*. Secara umum, *stunting* diderita sekitar 162 juta balita. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2025, masih terdapat 127 juta anak balita yang menderita *stunting*. Oleh karena itu, intervensi dan kegiatan atau program sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Lembaga kesehatan dunia (WHO) menargetkan pada tahun 2025 terjadi penurunan angka *stunting* menjadi 100 juta jiwa.

2.3.3 Penanggulangan Stunting

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan daerah yang berlandaskan pada Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi. Peraturan ini diterbitkan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menanggapi tingginya angka stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Perbup ini selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mengamanatkan pendekatan intervensi secara holistik, integratif, dan berbasis keluarga. Dalam Peraturan Bupati tersebut, Pasal 2 menjelaskan tujuan utama kebijakan, yakni “untuk meningkatkan

gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia melalui penanggulangan stunting secara terintegrasi.” Tujuan ini menunjukkan arah kebijakan daerah yang berpihak pada pembangunan kualitas sumber daya manusia dan mengatasi ketimpangan gizi sedari dulu.

Kemajuan pembangunan Indonesia ditandai dengan fokus yang signifikan pada penanganan masalah *stunting*. Kementerian Kehakiman Republik Indonesia telah menetapkan target pengurangan *stunting* menjadi 19% pada tahun 2024. Tidak adanya *stunting* dianggap sebagai prasyarat penting untuk mencapai perkembangan kesehatan holistik sepanjang umur. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, pemerintah telah melaksanakan kegiatan pencegahan *stunting* terpadu melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan RI No.61/PMK.07/2019. Peraturan ini memberikan pedoman pemanfaatan transfer dana ke daerah dan desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan *stunting* terpadu. Dari sisi pembiayaan, Pasal 8 menyebutkan bahwa anggaran pelaksanaan program berasal dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah, dana desa, serta sumber sah lainnya. Dengan demikian, Peraturan Bupati ini memberikan kerangka hukum, organisasi, dan pendanaan yang jelas bagi seluruh pelaksana kebijakan di daerah. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, khususnya dalam mengevaluasi implementasi kebijakan di Kecamatan Pinangsori.

Penanggulangan berarti mengatasi proses atau mengatasi suatu masalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berasal dari kata “*tanggulang*” yang berarti mengatasi atau menghadapi. Salah satu tujuan *SDGs*, program ke dua tanpa kelaparan (*zero hunger*), adalah untuk mencegah *stunting*. Artinya setiap orang akan mendapatkan nutrisi yang cukup, kita akan mencapai ketahanan pangan, dan

kita akan mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah menangani *stunting* melalui dua jenis *intervensi* yaitu *intervensi spesifik* dan *intervensi sensitif*. Sementara itu, Pasal 3 mengatur ruang lingkup penanggulangan stunting yang terdiri atas intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik mencakup kegiatan langsung terhadap ibu hamil, menyusui, dan balita, seperti pemberian makanan tambahan, pemantauan status gizi, dan imunisasi. Sedangkan intervensi gizi sensitif mencakup upaya-upaya seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, layanan KB, dan edukasi masyarakat.

Menurut Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting. *Intervensi spesifik* mencakup peningkatan gizi dan Kesehatan, dan *intervensi sensitif* mendukung penurunan kecepatan *stunting*.

Beberapa kegiatan *intervensi spesifik* yang dilakukan adalah :

1. *Intervensi* dengan sasaran ibu hamil

- a) Memberikan makanan tambahan bagi ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya
- b) Mengatasi kekurangan zat besi dan folat bagi ibu hamil
- c) Mengatasi kekurangan iodium
- d) Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil
- e) Melindungi ibu hamil dari malaria

2. *Intervensi* pada sasaran ibu menyusui dan anak pada umur 0-6 bulan :

- a) Mendorong ibu yang baru melahirkan agar langsung memberikan asi (*colostrum*)

- b) Mendorong pemberian asi ekslusif

3. *Intervensi* dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan :

- a) Penyediaan obat cacing
- b) Memberikan imunisasi lengkap
- c) Menyediakan suplementasi zink
- d) Mendorong ibu agar tetap memberikan ASI ekslusif hingga umur 2 tahun

Selain cara diatas Adapun kegiatan yang dilakukan pada *intervensi sensitif* penanggulangan *stunting* yaitu :

- a) Memastikan dan menyediakan air bersih
- b) Memastikan dan menyediakan akses pada sanitasi
- c) Menyediakan akses kepada layanan Kesehatan dan keluarga berencana (KB)
- d) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi
- e) Menyediakan jaminan Kesehatan atau BPJS
- f) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penanggulangan *stunting*, pola hidup yang sehat, dan pengelolaan makanan, sehingga masyarakat dapat terus berpartisipasi dalam program penanganan *stunting*.

Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah telah memperkenalkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020, yang berfokus pada penanggulangan *stunting* terpadu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan gizi individu, keluarga, dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ruang lingkup pencegahan dan

penanggulangan *stunting* mencakup *intervensi* nutrisi *spesifik* serta *intervensi* nutrisi *sensitif*. *Intervensi* nutrisi khusus menargetkan wanita hamil, ibu pascapersalinan, ibu menyusui, dan anak di bawah usia enam bulan, serta ibu menyusui dan anak-anak berusia tujuh hingga dua puluh tiga bulan. Di sisi lain, *intervensi* nutrisi *sensitif* dirancang untuk populasi umum, dengan penekanan khusus pada keluarga.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian sejenis guna memperkuat teori yang telah digunakan, atau menghasilkan teori baru apabila penelitian terdahulu tidak sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini menjadi acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 3. Peneliti Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan, Persamaan
1.	Dela, Rosita sari (2021)	Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu	Hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir dalam implementasi kebijakan penanganan stunting di pekon pamengang, kecamatan	-Perbedaan Peneliti terdahulu lebih fokus pada organisasi penanganan stunting yaitu Tim Gebrak Princes, sedangkan peneliti yang akan dilakukan berfokus

		<p>pagelaran, kabupaten prinsewu masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut diperkuat dengan temuan peneliti bahwa persentase prevalensi stunting pekon pamenang tidak menunjukkan perubahan, pada tahun 2020 sebesar 26,94% dan tahun 2021 masih tetap berada pada 26,94%. Berdasarkan temuan yang didapatkan di lapangan dalam pilar organisasi, anggota Tim Gebrak Princes pekon pamenang masih belum terlibat aktif dalam penanganan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pembagian tugas dan tupoksi kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam penanganan stunting.</p> <p>Interpretasi penanganan stunting yang dilakukan oleh pekon pamenang telaah sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten prinsewu. Namun belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga</p>	<p>pada implementasi peraturan bupati. Peneliti terdahulu menggunakan teori Jones (1996) sedangkan teori yang akan dilakukan peneliti adalah teori George C. Edward III.</p> <p>-Persamaan Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p>
--	--	--	---

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

31 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

			pemahaman masyarakat tentang stunting masih rendah. Selain itu, dalam menerapkan kebijakan penanganan stunting Tim Genrak Princes pamenang belum mengetahui tentang pedoman kinerja dan petunjuk teknis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan stunting.	
2.	Fenomen Naikrist Laia (2023)	Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara	Penelitian menunjukkan bahwa implementasi percepatan penurunan stunting di kabupaten nias selatan belum efektif dikarenakan partisipasi masyarakat yang kurang dengan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, sehingga belum mencapai target nasional dan ada beberapa kendala atau hambatan seperti sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik.	-Perbedaan Pada penelitian terdahulu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori George C. Edward III. -Persamaan Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	Salasati Dinas Mudi, Turtiantoro, Dewi Erowati (2018)	Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten pemalang dalam penurunan penaggulangan stunting di	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan stunting di desa longek yang masih belum sepenuhnya optimal diantaranya kejelasan dalam proses informasi	-Perbedaan Peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian. -Persamaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

		desa longkeyang, kecamatan bodeh, kabupaten pemalang.	antar pelaksana kegiatan masih terdapat adanya mis komunikasi, sumber daya manusia perangkat desa belum memenuhi standar kualifikasi dan kapabilitas, jumlah sumber daya manusia puskesmas jatiroyom masih kurang dalam melakukan promosi Kesehatan, kurangnya sumber daya peralatan di desa sebagai sarana penunjang, dana di desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang stunting. Sedangkan struktur birokrasi, transmisi kebijakan, konsistensi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor penghambat secara internal, eksternal dan geografis.	Peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori yang sama yaitu teori George C. Edward III. Peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
4.	Nabila Udzrotu Shauma,Dini Gandini Purbanigrum (2022)	Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi	Hasil penelitian menunjukkan terkait ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sudah dibuat sesuai dengan amanat peraturan nasional dan sudah dijalankan. Sumber daya manusia yang	-Perbedaan Pada penelitian terdahulu menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori George C. Edward III.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

33 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

		<p>berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk ketersediaan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Karakteristik organisasi, pelaksana, pembagian wewenang, ketersediaan SOP, dan pelaksanaan evaluasi pengawasan sudah dijalankan, namun masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang, masih ditemukan masyarakat yang tidak memahami dengan baik terkait pencegahan stunting.</p> <p>Komunikasi dan koordinasi masih kurang, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan</p>	<p>-Persamaan Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif</p>
--	--	--	---

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

34 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

			lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi .	
5.	Dhea Jayanti Pratiwi (2023)	Strategi Pencegahan Stunting di Kecamatan Medan Timur Kota Medan	Berdasarkan Hasil penelitian, penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Medan Timur dari 10 menjadi delapan balita stunting tidak dipengaruhi oleh program D'GINTING ini melainkan bahwa anak tersebut sudah lebih dari lima tahun, secara pelaksanaan program D'GINTING kurang efektif namun tetap memberikan dampak positif pada pemenuhan asupan makanan pada anak namun program tersebut berjalan tiga bulan dan pelaksanaannya 14 hari disetiap bulannya, selain itu dalam program D'GINTING hanya berfokus pada perbaikan gizi dan nutrisi balita stunting, faktor penghambat	<p>-Perbedaan Penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pencegahan sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi peraturan/kebijakan .</p> <p>Peneliti terdahulu menggunakan teori Michael A. Hitt sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori George C. Edward III.</p> <p>-Persamaan Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif.</p>

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

35 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/26

		pencegahan stunting di Kecamatan Medan Timur adalah ketidaksiapan anggaran dana, sarana dan prasarana, dan sosialisasi yang kurang maksimal.	
--	--	--	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menjadi dasar bagi peneliti untuk menulis karya ilmiah.

Kerangka pemikiran merupakan gambaran atau penjelasan mengenai faktor, teori, literatur, dan pengamatan yang telah dilakukan selama ini, yang kemudian dijadikan landasan melakukan penelitian. Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2017:66), kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai model konseptual dengan menghubungkan teori yang digunakan dalam beberapa faktor penyebab yang diidentifikasi sebagai masalah. Dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir tersebut merupakan pola berpikir tentang hubungan antara variabel atau masalah dan peristiwa yang mewakili hipotesis dalam penelitian.

Pada Lokasi penelitian yang telah ditentukan di Kecamatan Pinangsori, untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 36 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi , maka peneliti menggunakan teori Edward III (George, 1980) untuk mempermudah dalam menganalisisnya. Teori Edward ini menjelaskan ada 4 hal yang memiliki indikasi terhadap implementasi peraturan bupati daerah tapanuli tengah dalam penanggulangan stunting yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur

birokrasi. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirumuskan dalam bagian berikut.

Penulis mengambil teori implementasi dari George Edwards III, menurut George Edward keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Komunikasi

Untuk menjalankan kebijakan dengan sukses, implementor harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Untuk mengurangi distorsi implementasi, tujuan dan sasaran kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran. Penelitian ini akan menyelidiki bagaimana masyarakat sasaran menerima informasi tentang program pelatihan kerja, termasuk cara sosialisasi program, kejelasan informasi yang diberikan, dan konsistensi penyampaian antara perencana dan pelaksana. Untuk memastikan bahwa tujuan program dipahami dan diterima dengan baik oleh semua pihak, komunikasi yang efektif dianggap penting.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia, seperti kemampuan implementor, dan sumber daya keuangan, dapat menjadi komponen sumber daya tersebut. Untuk kebijakan berhasil dilaksanakan, sumber daya sangat penting. Jika tidak ada sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen kertas. Penelitian akan menyelidiki ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan peraturan terkait penanggulangan stunting di kecamatan pinangsori, yang mencakup tenaga kesehatan, fasilitas, dan anggaran. Kualitas dan

efektivitas penanggulangan *stunting* ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya ini.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, jujur, dan demokratis. Proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif jika implementor memiliki disposisi yang baik dan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Analisis perspektif dan komitmen pelaksana kebijakan, seperti pengelola penanggulangan *stunting* dan instruktur, terhadap pelaksanaan peraturan dan program penanggulangan *stunting* termasuk dalam fokus ini. Keberhasilan peraturan dan program penanggulangan *stunting* sangat dipengaruhi oleh sikap pendukung seperti kejujuran, dedikasi, dan profesionalisme.

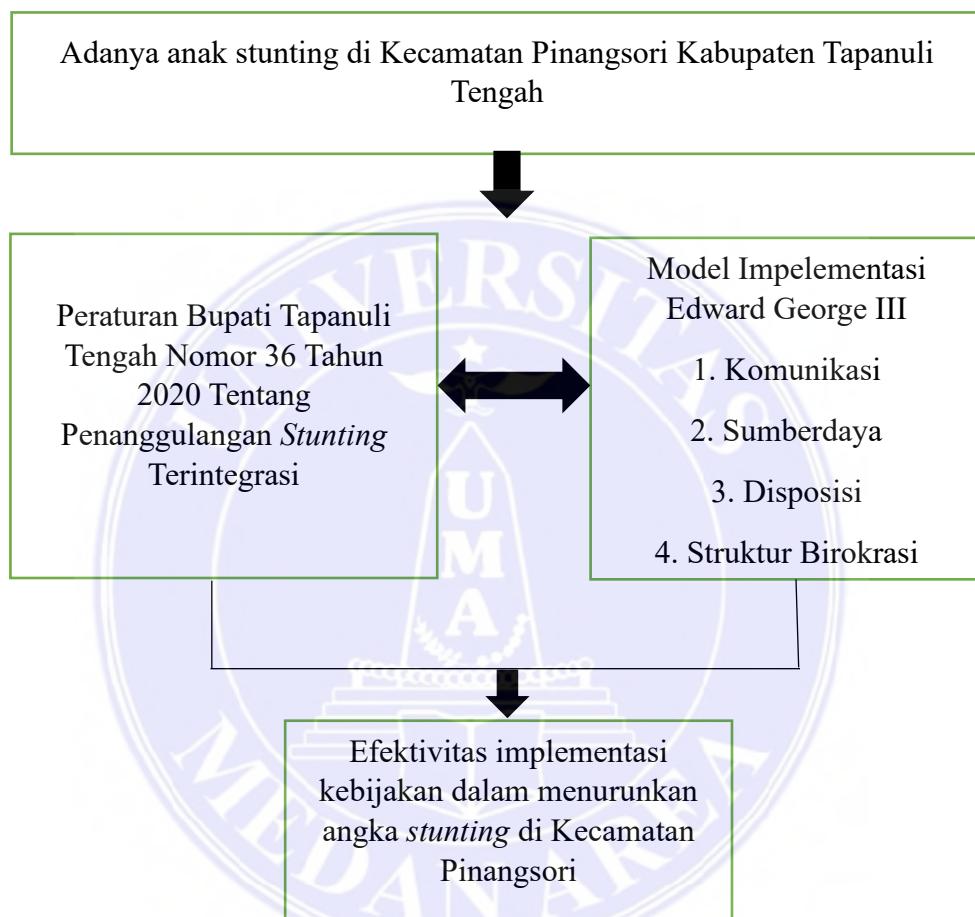
4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Penelitian juga akan menilai aspek struktur birokrasi, termasuk prosedur, mekanisme kerja, dan koordinasi antara Dinas Kesehatan dengan Pemerintahan Kecamatan Pinangsori. Prosedur yang terlalu rumit atau koordinasi yang lemah dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kerangka pemikiran dari Implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah No 36 tahun

2020 tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori sebagai berikut :

Gambar I Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah peneliti, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan dan menceritakan fenomena yang menjadi fokus penelitian, sekaligus melakukan analisis mendalam terhadap objek penelitian. Karena metode kualitatif menekankan pada pemahaman yang lebih rinci dan menyeluruh, maka hasil penelitian yang diperoleh mampu mengungkap fenomena secara luas dan mendalam. Penelitian kualitatif sendiri merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan wawasan dan pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan statistik atau metode kuantitatif lainnya.

Sugiyono (2014:1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen kunci dan menerapkan triangulasi (kombinasi berbagai metode). Analisis data dilakukan secara induktif, dengan penekanan pada makna hasil penelitian daripada generalisasi. Penelitian kualitatif melibatkan subjek dan lingkungan alamiah, sehingga sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek alamiah merupakan objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya relatif tetap stabil saat peneliti melakukan penelitian dan setelahnya. Sebaliknya, pendekatan eksperimen dilakukan di laboratorium dengan kondisi yang terkendali dan variabel yang dimanipulasi. Oleh karena itu, hasil penelitian laboratorium sering kali tidak mencerminkan kondisi dunia nyata.

Metode penelitian ini didasarkan pada pergeseran paradigma dalam pemahaman fenomena sosial. Dari positivisme, yang melihat fenomena secara tunggal, statis, dan konkret ke paradigma *postpositivisme*, yang melihat realitas sebagai sesuatu yang luas, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma ini mendasari penggunaan metode penelitian kualitatif, yang menggunakan peneliti sebagai instrument atau “*human instrument*.” Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori, agar mendapatkan pemahaman yang jelas dan bermakna terhadap Peraturan tersebut.

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Tapanuli Tengah No 36 tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori. Lokasi penelitian didasarkan karena kasus stunting di wilayah tersebut.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Tapanuli Tengah No 36 tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori dilakukan Pada Bulan Januari 2025 Hingga Bulan Februari 2025.

Tabel 4. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okto 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025
1	Penyusunan Proposal										
2	Seminar Proposal										
3	Perbaikan Proposal										
4	Pelaksanaan penelitian										
5	Penyusunan Skripsi										
6	Seminar Hasil										
7	Perbaikan Skripsi										
8.	Sidang Meja Hijau										

3.3 Informan Penelitian

Informa penelitian merupakan individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi yang diperlukan, dan sumber informasi tersebut dapat berupa orang atau hal lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Informan tersebut merupakan individu yang mampu memberikan informasi mengenai dirinya, orang lain, atau kejadian yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada penilaian terhadap kemampuannya dalam memberikan informasi yang relevan dan terperinci, sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam kegiatan ini, teknik pemilihan informan melibatkan perangkat daerah di Kecamatan Pinangsori yang terlibat langsung dalam kejadian yang diteliti.

1. Informan kunci

Informan kunci adalah orang yang mempunyai otoritas dan pengaruh yang dapat memberikan informasi tentang subjek penelitian. Sebagai bagian dari investigasi, akan dilakukan wawancara terhadap informan yang terkait dan hasil wawancara akan dicatat. Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan paling rincu tentang semua aspek yang ingin selidiki peneliti. Oleh karena itu diperlukan informan kunci untuk memahami gambaran keseluruhan permasalahan yang diamati dan mengajukan pertanyaan. Dalam penelitian ini, infroman kunci adalah Camat Pinangsori.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu maupun kelompok yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Informan utama dapat memberikan penjelasan topik penelitian dengan informasi permasalahan yang teknis dan detail. Dalam penelitian ini, informan utamanya adalah Ahli Gizi Puskesmas, Koordinator PLKB, dan kader posyandu di Kecamatan Pinangsori

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah orang-orang yang dijadikan sumber data atau informasi sekunder yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Penyedia informasi tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan terhadap analisis penelitian. Informan tambahan dapat

memberikan informasi yang terkadang tidak didapatkan oleh informan kunci dan informan utama. Pada penelitian ini informan tambahannya adalah orangtua yang memiliki balita *stunting*.

Tabel 5. Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Agus Harianto SSTP	Camat	1 orang
2.	Informan Utama	1.Olga Sarumpaet 2.Samsidar Puspa Suryani Samosir	Ahli Gizi Koordinator PLKB	2 orang
3.	Informan Tambahan	1. Nurintan Sitompul 2. Aini Laoli	Kader Posyandu Orangtua yang memiliki stunting	2 orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan dalam penelitian. Proses ini merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Sugiyono (2014:63). Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, hasil penelitian tidak akan dapat diandalkan dan mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang akan diteliti. Oleh karena itu, pemilihan teknik yang tepat sangat penting untuk menjamin kualitas dan validitas data yang diperoleh.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai siring, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari siringnya, data dapat dikumpulkan dalam lingkungan alami (natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen,

di rumah dengan berbagai responden, di seminar, diskusi, di jalan, dan sebagainya. Menurut sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sedangkan sumber sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumen. Selain itu, dari perspektif teknik atau metode pengumpulan data, ada beberapa teknik, seperti observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:70) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang telah mereka amati. Data ini dikumpulkan dan sering dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) dan sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diamati dengan jelas. Menurut Marshall Sugiyono (2014:71) Peneliti belajar tentang perilaku dan maknanya melalui observasi.

Peneliti dalam penelitian ini akan memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori. Melakukan observasi ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana kegiatan diselenggarakan, bagaimana interaksi antara pegawai dan masyarakat, serta fasilitas yang tersedia di Kecamatan Pinangsori. Selain itu, observasi akan mencatat perilaku, respons, dan tingkat keterlibatan pegawai dan masyarakat, yang diharapkan

observasi ini akan memberikan data yang lebih kaya dan mendalam untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang pelaksanaan dan tantangan peraturan tersebut.

2. Wawancara

Menurut Eastberg dalam Sugiyono (2014:72), wawancara merupakan pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat membangun pemahaman terhadap suatu topik tertentu. Apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti, maka wawancara dapat digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data. Metode ini juga relevan apabila peneliti ingin menggali lebih dalam tentang responden, termasuk pengetahuan dan keyakinan pribadinya, atau setidaknya memperoleh laporan tentang dirinya sendiri, yang menjadi dasar dari teknik pengumpulan data ini.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:72) menyatakan bahwa wawancara memberikan peneliti suatu cara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana partisipan memaknai suatu situasi atau fenomena, dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh melalui observasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat menggali informasi yang lebih rinci tentang perspektif partisipan terhadap situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat diungkap hanya melalui metode observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekapitulasi peristiwa masa lalu. Mereka dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan adalah catatan harian, Sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Contoh gambar adalah foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif penggunaan Teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Dalam hal dokumen Bogdan dalam Sugiyono (2014:83) menyatakan "*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief*".

Salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi lapangan, ini sangat penting untuk memberikan catatan historis yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dan memberikan konteks terhadap data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan. Catatan program, kebijakan, foto kegiatan, dan hasil evaluasi program penanggulangan *stunting* di Kecamatan Pinangsori adalah beberapa contoh dokumen yang dapat dikumpulkan.

Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penanggulangan *stunting*, dimana dokumen yang ada mengonfirmasi, melengkapi, atau memperkuat informasi dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian kualitatif, dokumen pribadi dapat mencakup berbagai kisah pribadi yang menunjukkan tindakan, pengalaman, dan keyakinan seseorang, seperti yang dinyatakan oleh

Bogdan dalam Sugiyono (2014:84). Ini dapat memberikan perspektif tambahan untuk memahami fenomena yang diteliti.

4. Triangulasi Data

Triangulasi data menggunakan sumber, metode, atau pendekatan lain di luar data yang sedang diteliti untuk memvalidasi dan membandingkan data. Menurut Sugiyono (2007:372), triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber atau informasi lain di luar data utama. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data penelitian. Triangulasi data ini akan membantu peneliti memvalidasi temuan wawancara dan mengevaluasi data keberhasilan peraturan terkait penanggulangan *stunting* di Kecamatan Pinangsori.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data diperlukan untuk mencari pemecahan atas permasalahan yang timbul selama proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, analisis data dimulai pada saat wawancara, yaitu saat peneliti mulai mengevaluasi tanggapan informan. Apabila jawaban yang diberikan informan tidak sesuai dengan tujuan penelitian atau kurang spesifik, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga data yang diperoleh dapat dianggap sahih. Tujuan teknik analisis data adalah untuk menarik kesimpulan umum dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data menggunakan model Miles Huberman dan saldana (2014:12-4). Ada tiga alur analisis data yang dirinci dibawah ini :

1. Reduksi Data

Reduksi merupakan tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif, karena banyaknya data penelitian di bidang ini, maka perlu diringkas dalam satu bagian dan merangkum pokok permasalahan secara rinci. Reduksi data adalah proses merangkum data dari hasil lapangan, memilih yang paling penting, dan memusatkan perhatian pada apa yang penting dan perlu serta pada topik utama.

2. Penyajian Data

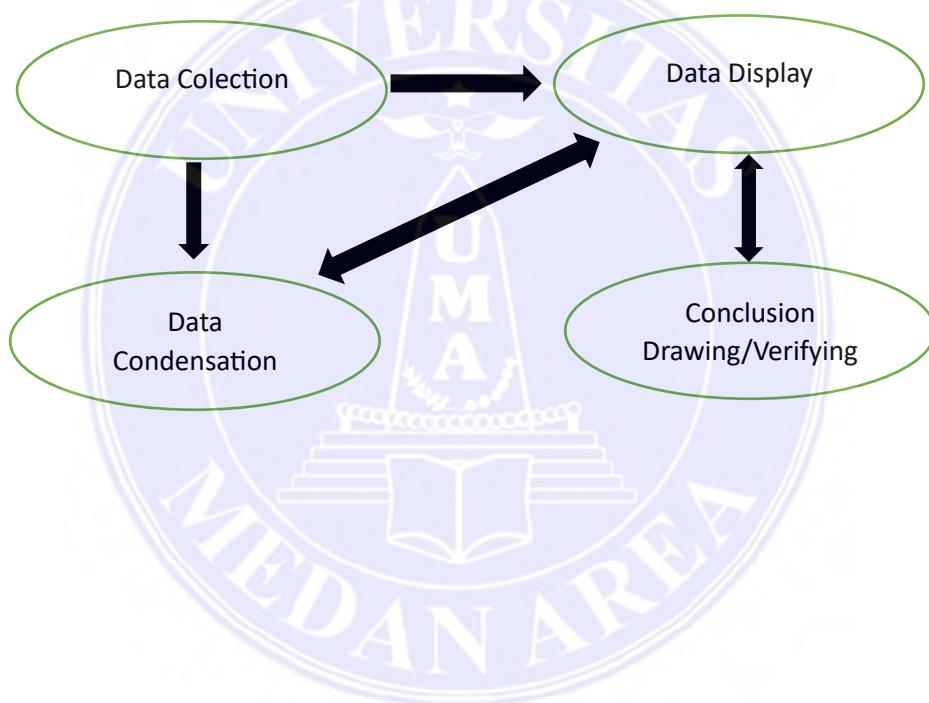
Penyajian teknik analisis data penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan sederhana diagram, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Pada tahap persentasi ini, peneliti mengumpulkan data dilapangan dan setelah melakukan evaluasi khusus, mengklarifikasi data atau mengelompokan data ke dalam kategori tertentu. Oleh karena itu, mengklarifikasi data membantu peneliti menentukan data yang paling penting dan paling tidak penting selama fase reduksi, sehingga memungkinkan mereka untuk mengkategorikan data yang dikumpulkan.

3. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam tahap analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah melalui dua fase sebelumnya diambil kesimpulan untuk membantu peneliti mengeksplorasi dan menemukan permasalahan yang muncul dalam

bidang ini. Pada tahap akhir ini, peneliti menentukan keterangan, pola penjelasan, aliran sebab akibat, pertanyaan, dan konfigurasi. Peneliti melaksanakan tahap akhir secara terus menerus sambil melakukan penelitian di lapangan. Maka data untuk dituliskan dalam kesimpulan. Langkah ini dilakukan sampai peneliti menyelesaikan laporan dan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan peneliti yang dilakukan.

Gambar 2 Teknik Analisis Data



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Teori implementasi kebijakan Edward III digunakan untuk memeriksa penanggulangan *stunting* di Kecamatan Pinangsori. Teori ini mencakup aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang sosialisasi masih belum lengkap. Pemerintah dan Dinas Pendidikan bekerja sama untuk menyebarkan informasi di sekolah. Meskipun anggaran masih kurang, kondisinya baik dari segi sumber daya manusia dan fasilitas. Program berhasil berkat komitmen yang kuat dari pihak terkait. Struktur birokrasi dan prosedur prosedur standar (SOP) telah diatur untuk memenuhi tugas masing-masing. Keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan prioritas ekonomi membuat sebagian orang lebih fokus mencari nafkah daripada mengikuti program adalah kendala utama yang dihadapi. Angka *stunting* terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.

5.2 Saran

Penelitian ini menyelidiki Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kecamatan Pinangsori. Berdasarkan keadaan saat ini, peneliti menyarankan agar pemerintah terus mensosialisasikan tujuan dan manfaat penanggulangan *stunting* kepada masyarakat. Mereka juga harus menentukan dengan jelas sasaran dari sosialisasi tersebut, karena peraturan ini dianggap sebagai peraturan yang wajib dan penting untuk diketahui oleh semua orang. Meskipun ada kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan memastikan bahwa proses perlindungan dan pelayanan publik untuk

anak berjalan dengan lancar, masyarakat diharapkan aktif dan mendukung pemerintah dalam menjalankan peraturan tentang penanggulangan stunting terintegrasi.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

81 Document Accepted 19/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/1/26

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006. “ *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang* ”. Jakarta : PT Alex Media Erlangga
- Helmyati, Siti. DKK. (2019). *STUNTING Permasalahan dan Penanganannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keban, Y. T. (2022). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muda, I., & Aulia, S. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Muda Indra. A.R 2022) *Implementasi Evaluasi Kebijakan*.Media Persada
- Mulyadi (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pramono, (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- WHO. (2018). *Child Growth Standards: Stunting Definitions and Indicators*. World Health Organization.
- Wibawa, S. (2018). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana

Karya Ilmiah

- Archda, R., & Tumangger, J. (2019). *Hulu-hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia*.
- Aridiyah, F. O. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Jember.

- Fallo, A. R. (2020). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kie*. Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial, 1(2), 1-21.
- Fatih, H. H. (2022). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) "Kencana Sehati" dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 162-170.
- Laia, F. N. (2023). IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
- McGovern, M. E., Krishna, A., Aguayo, V. M., & Subramanian, S. V. (2017). *A Review of the Evidence Linking Child Stunting to Economic Outcomes*. Harvard University.
- Mudi, S. D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam Penurunan dan Penanggulangan Stunting di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(4), 105-117.
- Nabila, U. S., & Purbaningrum, D. G. (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi*. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 200-207.
- Putri, S. Y. (2021). *Implementasi Program Tujuan Pembangunan BerkelaJutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting di Indonesia*. Jurnal PIR: Power in International Relations, 5(2), 163-174.
- Pratiwi, D. J. (2023). Strategi Pencegahan Stunting Di Kecamatan Medan Timur Kota Medan. 1–97.
- Sari, D. R. (2021). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Pekon Pamenang Kecamatan Pengelaran Kabupaten Pringsewu tahun 2021. *Skripsi S1, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi*. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 200-207.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifanti, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bandung*. Responsive, 4(4), 205-213.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Zakiyah Nurul. (2021). Upaya Puskesmas Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia *Peraturan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*

Bupati Tapanuli Tengah *Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia *Peraturan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Dana Desa untuk Program Pencegahan Stunting Terintegrasi*

Internet

Kementerian Kesehatan RI. (2023). (Diakses pada 17 Oktober 2024).

Kantong Berita (2023). (Diakses pada 17 Oktober 2024).

MetroDaily (2024). (Diakses pada 09 Februari 2025).

SinarlintasNews.com (2023). (Diakses pada 10 Februari 2025)

tapteng.go.id (2024). (Diakses pada 09 Februari 2025)

LAMPIRAN

Gambar 1. Dokumentasi dengan Camat dan Staf Kecamatan Pinangsori



Gambar 2 Dokumentasi dengan Ahli Gizi Puskesmas Pinangsori



Gambar 3. Dokumentasi dengan Koordinator dan Staf PLKB



Gambar 4. Dokumentasi dengan kader posyandu dan masyarakat yang memiliki balita



SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Seraya Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 186/FIS.2/01.10/I/2025

Medan, 22/01/2025

Lampiran. : -

H a l : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.

Camat Pinangsori

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Melysa Febi Maria Tobing

NIM : 218520001

Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Kecamatan Pinangsori untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI (STUDI KASUS KECAMATAN PINANGSORI)”

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR CAMAT PINANGSORI



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH KECAMATAN PINANGSORI

Jln. Jend. A. Yani No. 1 Telp. (0631) 391371 - 391391 Pinangsori 22653

SURAT KETERANGAN RISET PENELITIAN

NOMOR : 071/ OSS /KCP/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS HARIANTO,SSTP
NIP : 1830328 200112 1 004
Jabatan : Camat Pinangsori

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : MELYSA FEBI MARIA TOBING
NIM : 218520001
Program Studi : Administrasi Publik

Adalah benar telah melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Camat Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, terhitung mulai tanggal 03 Februari s/d 10 Februari 2025, dengan Judul sebagai berikut :

"IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI (STUDI KASUS KECAMATAN PINANGSORI)".

Demikian Surat Keterangan Riset Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pinangsori, 27 Maret 2025

CAMAT PINANGSORI

AGUS HARIANTO,SSTP
PEMBINA
NIP. 1830328 200112 1 004

Tabel 8. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara untuk informan kunci, informan utama, dan informan tambahan

No	Informan	Pedoman Wawancara
1.	Informan kunci dan informan utama	<p>a. Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme penyampaikan informasi tentang Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi kepada masyarakat pinangsori? 2. Apakah ada strategi khusus yang digunakan dalam menyebarkan informasi Peraturan ini untuk mencapai sasaran yang tepat? 3. Apakah ada feedback dari masyarakat tentang kebijakan ini? 4. Apakah terdapat hambatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat? <p>b. Sumber daya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait dengan anggaran untuk program terkait stunting, menurut Bapak/Ibu apakah sudah memadai? 2. Bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan stunting tersebut? 3. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas SDM terkait kebijakan tersebut? 4. Terkait fasilitas untuk stunting apakah sudah memadai? <p>c. Disposisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap kebijakan ini? 2. Bagaimana komitmen Bapak/Ibu terhadap keberhasilan kebijakan ini? 3. Bagaimana cara anda memotivasi tim agar tetap berkomitmen dalam menjalankan kebijakan ini? <p>d. Struktur birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah SOP terkait kebijakan ini sudah disusun dengan baik? 2. Apakah pembagian tugas antar instansi telah berjalan efektif? 3. Menurut Bapak/Ibu apakah SOP yang diberikan mudah dipahami? 4. Apakah terdapat regulasi yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini?

2.	Informan tambahan	<p>a. Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah ibu mengetahui Peraturan terkait dengan penanggulangan stunting terintegrasi ini? dan dari mana ibu mengetahui informasi tersebut?2. Apakah ibu pernah kesulitan mendapatkan informasi terkait dengan penanggulangan stunting?3. Menurut ibu, apakah pemerintah dan tenaga kesehatan cukup aktif dalam memberikan informasi terkait dengan stunting? <p>b. Sumber daya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah fasilitas kesehatan seperti posyandu mudah diakses oleh masyarakat?2. Apakah ibu mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti makanan tambahan atau suplemen gizi? <p>c. Disposisi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sejauh mana kesadaran dan kepedulian anda terhadap pentingnya pencegahan stunting?2. Bagaimana pendapat Ibu mengenai peran pemerintah dalam membantu mengatasi masalah stunting? <p>d. Struktur birokrasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah ada bantuan atau pendampingan program dari pemerintah yang ibu rasakan manfaatnya?2. Apa harapan ibu terhadap pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting?
----	-------------------	--